

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak manusia pertama hidup di muka bumi maka peradaban manusia dimulai. Peradaban ini terus berkembang melahirkan garis keturunan-keturunan baru yang menjadi latar belakang historis setiap manusia. Hal inilah yang menciptakan identitas setiap manusia. Manusia sebagai makhluk sosial cenderung mengelompok sesuai identitasnya masing-masing baik dalam kelompok suku, agama, budaya yang akan mendasari terciptanya kelompok bangsa maupun negara. Dunia yang terbagi menjadi ratusan Negara tentunya memiliki jumlah keragaman identitas yang sangat besar. Di benua Afrika kelompok identitas suku sangat beragam yang menyebar dalam 53 negara. Sehingga tidak mengherankan dalam sebuah Negara terdiri dari berbagai etnis dan suku atau dikatakan sebagai *multi-ethnic states*. Keragaman ini sayangnya menjadikan kawasan Afrika sangat rawan konflik. Konflik yang terjadi bisa saja merupakan konflik etnik dalam satu negara atau konflik kelompok etnik dengan pemerintahan atau konflik antar negara.

Menurut lembaga yang melakukan penelitian atas konflik-konflik internasional yang berkedudukan di Heidelberg, Jerman HIIK (*Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung*) konflik di Afrika berasal dari negara-negara seperti: Burundi, Sudan, Somalia, Pantai Gading, Guinea, Chad,

dan Uganda. Jauh sebelumnya, di Kongo, Rwanda, Nigeria, pertikaian etnis atau suku lebih kental dibandingkan dengan kesenjangan sosial ekonomi. Afrika terseret dalam kancah perang dan pertikaian antar suku dan antar etnik yang paling parah dan sulit dicarikan solusi damainya. Tangan-tangan PBB seperti lumpuh tak berdaya. Jasa negarawan dunia dan inisiatif berbagai pihak masih terus diharapkan untuk menjadi mediator untuk mengakhiri konflik berdarah yang mengakibatkan banyak jatuh korban, termasuk anak-anak di bawah umur. Laporan tahunan HIIK menyebutkan anak-anak di bawah umur telah terseret menjadi milisi dan tentara sukarela yang dipaksa ikut perang memanggul senjata. Afrika benar-benar negeri yang tak pernah sepi dari derita keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, diskriminasi, perang saudara, pelanggaran HAM, ancaman kesehatan penyakit seperti HIV/AIDS, malaria, TBC, dan malnutrisi. Ia mengulang kembali asal muasal konflik karena ketidakadilan, masih bercokolnya penguasa tiran dan korup serta rakyatnya yang belum sepenuhnya merengkuh nikmat kemerdekaan. Sebagai bentuk keterpanggilan akan “kesalahan” orang kulit putih atau kritik peneliti Barat atas pionir misioner yang memperkenalkan “*civilization*” ke sana, kini semakin tampil tokoh humanis Barat yang memberikan pembelaan dan keberpihakannya untuk memajukan dan menggiatkan kesejahteraan rakyat Afrika. **Walter Michler** dalam Buku Putih (*Weissbuch Afrika*) sejak 1990-an berulang kali berkampanye bahwa Afrika menjadi terpuruk bukan semata-mata karena rakyatnya. Sumber masalah dimulai sejak warisan kolonial Barat yang mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) Afrika dengan memanjakan dan menjinakkan tokoh elitnya dengan gaya hidup kebarat-baratan.

Kelaparan di sana bukan karena nasib semata, tetapi kesalahan politik dan salah urus negara serta kudeta yang silih berganti, belum lagi pernah dihantam isolasi internasional karena dosa rezimnya. Wajah konflik Afrika seperti kesaksian Dubes Italia untuk Somalia, **Mario Raffaelli** semakin kompleks, eskalasinya terus meningkat, aktor perang tambah beragam, dan kondisinya semakin runyam.¹

Hingga saat ini, di Afrika masih belum terjadi adanya stabilitas kawasan yang mantap untuk berjalannya pembangunan regional Afrika. Kerawanan konflik di Afrika menyebabkan kawasan itu tidak bisa maju seperti Asia yang kini sebagai kawasan dengan pertumbuhan ekonomi paling cepat di dunia.

Negara Sudan termasuk negara yang paling luas di benua Afrika dengan total sekitar 2.5 juta km². Negara Sudan memiliki 597 suku dan dengan 400 ragam dialek bahasa dan mereka terbagi menjadi dua komunitas yakni komunitas Arab dan non-Arab. Negara ini telah mengalami konflik yang sangat panjang konflik yang biasa terjadi adalah konflik internal, antara etnis, pemerintah dan kelompok-kelompok tertentu. Misalnya konflik di Sudan Selatan dan Sudan Barat (Darfur) dan ternyata konflik ini berdampak pada negara-negara tetangga Sudan, Chad. Konflik Sudan Selatan apalagi Darfur dianggap menjadi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia oleh *United Nation* (UN/ PBB).²

Berlangsungnya konflik di Sudan Selatan telah dimulai sejak tahun 1955 yang terbagi pada perang sipil pertama dan kedua. Perang sipil di Sudan Selatan berawal dari ketidakadilan sehingga muncul tuntutan untuk memisahkan diri dari

¹ Bachtiar Aly. Tanpa Tahun. "Afrika digerogoti Konflik". dalam www.unisosdem.org, diakses tanggal 22 Februari 2008.

² www.wikipedia.com. "Sudan", diakses 20 Mei 2008.

Sudan. Pada tahun 1955, beberapa tahun sebelum merdeka, perang sipil terjadi antara Sudan Utara dan Sudan Selatan. Pemicunya adalah rasa kecurigaan orang Sudan Selatan dimana nanti setelah merdeka kekuasaan akan di dominasi oleh Sudan Utara karena sebagian besar warga utara adalah keturunan Arab dan Muslim sedangkan Selatan terdiri dari kristen dan penganut kepercayaan animisme. Perang berakhir pada tahun 1972 dengan ditandai penandatanganan perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak, lewat *Addis Ababa Agreement* (A.A.A) yang disponsori oleh *World Council of Churches*.³

Perdamaian tersebut ternyata hanya terjadi selama sepuluh tahun, pada tahun 1983 **Presiden Gaafar Nimeiri** mengingkari hasil Addis Ababa 1972, dan menginginkan terbentuknya negara baru yang memakai hukum Syariah Islam. Tentunya hal ini mendapat pertentangan kembali dari masyarakat diluar Islam yakni yang tinggal di Sudan Selatan. Mereka pada akhirnya membentuk gerakan bernama *The Sudan People's Liberation Army (SPLA)* pada tahun 1983. Pada tahun 1989, terjadi kudeta terhadap Khartoum sehingga pemerintahan jatuh ke tangan **Omar Al Bashir dan Front Islam Nasional** yang dipimpin oleh **Dr. Hassan Al Turabi**. Pemerintahan yang baru ini memiliki visi Islami dan kemudian membentuk *The popular Defence Force (al Difaa al Shabi)* dan memulai prapaganda keagamaan untuk merekrut anggota, dan menekan kelompok SPLA. Keadaan ini menyebabkan kekacauan dan kekerasan di masyarakat terutama penganut Kristen dan agama kepercayaan. Kelompok SPLA kemudian memulai langkah marxis dengan meminta bantuan dari Uni Soviet dan Presiden

³ *Ibid.*

Etiopia **Mengestu Haile Meriem**. Perang ini berlangsung selama hampir duapuluh tahun dan telah menyebabkan tewasnya dua juta orang dan sekitar empat juta orang lainnya mengungsi (diperkirakan saat tersebut total penduduk Sudan sekitar 32 juta jiwa) dan menghancurkan sektor-sektor ekonomi dan menyebabkan terjadinya krisis pangan, kesehatan, dan pendidikan serta pekerjaan.⁴

Namun dengan adanya itikad untuk mengakhiri peperangan dengan negosiasi dan mediasi pada tanggal 9 Januari 2005 dilakukannya pembicaraan untuk mengakhiri perang dengan menyepakati *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) di Nairobi. Persetujuan ini di dukung oleh OKI, GCC, IGAD (*Inter-Goverment Authority on Development*) yang beranggotakan tujuh negara Afrika Timur, Amerika Serikat dan Inggris serta sejumlah negara lain.⁵

Tidak lama setelah konflik Sudan Selatan mereda, konflik di Sudan bagian Barat (Darfur) mencuat. Konflik di Darfur sebenarnya telah terjadi selama hampir 30 tahun (1968-1998) dalam skala dan intensitas kecil. Waktu itu presiden **Bashir** menyebutnya “*skirmishes*” (bentrokan senjata kecil). Penyebab konflik pada waktu itu terutama karena perebutan sumber daya alam, yang menyangkut air dan ladang peternakan/ bercocok tanam. Konflik tersebut bisa terjadi antarsuku maupun intersuku di Darfur. Februari 2003 dua aliansi kelompok pemberontak Darfur, *Sudan Liberation Movement Army* (SLM/A) dan *Justice and Equality Movement* (JEM) menyerang instalasi militer di Galo, Jabbal Marra.. Para

⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

⁵ Abdul Hadi Adnan. *Penyelesaian Masalah Sudan Selatan dan Krisis di Darfur*, diakses 17 April 2008.

pemberontak tersebut menuntut keadilan atas praktik marjinalisasi ekonomi dan politik yang dialami Darfur. Mereka menyerang militer juga karena tujuan melindungi komunitasnya dari serangan militan Arab yang didukung militer. Militan Arab ini sering disebut kelompok *Janjaweed* yang lalu menerima dukungan penuh pemerintah Sudan untuk membersihkan daerah Darfur dari warga yang tidak loyal. Serangan para milisi ini menyebabkan pengungsian besar, pembunuhan, pemerkosaan massal yang menurut Konvensi Jenewa 1949 Pasal 3 sangat terlarang. Krisis Darfur menjadi konflik yang sangat rumit (*multiple intertwined conflicts*). Kondisi sosial-ekonomi sebenarnya di Darfur sungguh sangat menyedihkan. Kekeringan selama 30 tahun melanda daerah gurun pasir yang dihuni 6 juta orang. Padahal kebanyakan penduduk hidup dari pertanian dan peternakan. Tanpa konflik bersenjata pun mereka hidup sengsara. Air merupakan komoditas langka, termasuk di kota seperti Al Fashir, Nyala dan Al-Jenina. Sekecil apapun pergolakan bersenjata hanya akan tambah menyengsarakan penduduk Darfur.⁶

PBB memperkirakan konflik selama lima tahun antara etnis pemberontak Afrika dengan militan Arab (*Janjaweed*) yang didukung oleh pemerintah pusat sudah merenggut sedikitnya 200.000 jiwa dan membuat 2,2 juta orang meninggalkan tempat tinggal mereka sejak 2003.⁷ Anak-anak dipaksa untuk memegang senjata dan banyaknya kasus pelanggaran HAM di wilayah konflik

⁶ Abdul Hadi Adnan, *Op. Cit.* Hlm. 3-6.

⁷ www.harian-global.com. "Sudan: Korban Darfur 10.000 Tewas", diakses 20 April 2008.

ini. Menurut dokumen Human Right Watch, *Children In Sudan Slaves, Street Children and Child Soldiers*

*The children of Sudan, north and south, have been denied their basic rights by all parties to the conflict, and by the government of Sudan even in areas where there is no conflict going on. Those considered street children, mostly southerners and Nuba, are removed from their families without notice, denied their right to identity when they are given new Arab names, and denied their right to freedom of religion when they are subjected to forcible conversion. Dinka and Nuba children have been captured in military raids on their villages and taken into household slavery by their captors, with no government intervention to stop the practice and punish those who treat them as slaves. Underage boys are forcibly recruited into the army or militias by the government, which at the same time attempts to focus world attention on the SPLA's use of child soldiers.*⁸

Untuk masalah Sudan Selatan PBB telah menempatkan pasukan perdamaianya yang bernama *United Nation Mission in Sudan* (UNMIS). Tugas dari pasukan ini jelas untuk menjaga proses perdamaian yang telah terjadi di Sudan Selatan setelah ditandatanganinya CPA. Dalam kaitan masalah Darfur, pihak pemerintah sebenarnya tidak menginginkan adanya campur tangan dari pihak luar baik itu PBB apalagi NATO. Mereka beranggapan masalah Darfur adalah masalah internal Negara Sudan yang bisa diatasi. Namun pada kenyataannya dengan banyaknya jumlah korban jiwa dan semakin banyak warga yang mengungsi ke perbatasan Chad, konflik ini menjadi perhatian dunia terutama disorotnya aksi kekerasan, pengusiran, pemerkosaan, pembunuhan yang dilakukan oleh milisi Janjaweed terhadap warga non Arab yang tidak loyal kepada pemerintah.

⁸ www.hrw.org. "Human Right Watch, Children in Sudan; Slaves, Street, Children and Child Souldiers", diakses 20 April 2008.

Dewan Keamanan PBB memang telah mengeluarkan sejumlah resolusi: Resolusi 1547 (2004) mengenai pembentukan *U.N. Advance Mission in Sudan (UNAMIS)*. Resolusi 1556 (2004), yang memerintahkan pemerintah Sudan melucuti senjata milisi Janjaweed dalam waktu sebulan. Liga Arab bereaksi, meminta agar batas waktu tersebut diperlonggar dan mengingatkan agar Sudan tidak bernasib seperti Irak. Resolusi 1585 (2005) yang memperpanjang mandat UNAMIS. Resolusi 1590 dan 1591 (Maret 2005) mengenai larangan bepergian dan pembekuan asset para pejabat Pemerintah dan pihak pemberontak yang diduga terkait dengan pelanggaran HAM di Darfur. Resolusi 1593 (April 2005) yang memberikan sanksi tambahan untuk Sudan, antara lain embargo senjata bagi Pemerintah Sudan dan larangan pesawat Pemerintah Sudan melakukan operasi militer dan mengharuskan Pemerintah Sudan untuk melapor pada DK-PBB jika ingin mengirimkan peralatan militer ke wilayah Darfur. Resolusi juga menyangkut pengajuan tersangka pelanggar HAM ke Mahkamah Internasional. PBB sebelumnya mengirimkan *International Commission of Inquiry on Darfur* di bulan Februari 2005. Sejumlah resolusi ini banyak yang ditolak dan dikecam balik oleh pemerintah Sudan dikarenakan pemerintah Sudan tidak berharap ada campur tangan pihak lain. Dan pada akhirnya Pemerintah Sudan menyetujui untuk mendapatkan mediasi dari Uni Afrika. Pemerintah Sudan beranggapan Uni Afrika mungkin dapat memahami apa yang terjadi di Sudan lebih baik dan dapat mencari pemecahannya didasarkan dari kesamaan latar belakang budaya Afrika.

Akhirnya Uni Afrika mengirimkan pasukan perdamaian yang pertama di Sudan di tahun 2004. Uni Afrika merupakan penerus Organisasi Persatuan

Afrika (OAU) sejak tanggal 9 Juli 2002. Ketua UA pertama ialah **Thabo Mbeki**, Presiden Afrika Selatan dan UA bermarkas di Addis Ababa, Ethiopia. Berdirinya Uni Afrika tidak terlepas dari latar belakangnya yang menginginkan penguatan solidaritas negara-negara Afrika dalam upaya keluar dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Hal ini menjadi salah satu tujuan utama *Organization of African Unity* (OAU) yang menjadi cikal bakal *African Union* (AU/ UA). Uni Afrika terbentuk selain mengokohkan kembali tujuan awal berdirinya OAU juga dikarenakan tuntutan zaman yang menghendaki adanya kerjasama yang intens untuk mencegah timbulnya sifat hubungan yang anarkis atau konflikatif dan dapat bersaing dalam menghadapi tantangan eksternal. Dengan demikian kerjasama regional ini diharapkan mampu meningkatkan stabilitas keamanan kawasan, pemahaman terhadap nilai-nilai bersama serta dapat mengatasi masalah bersama. Selain itu, dalam dinamika Hubungan Internasional kontemporer pasca runtuhnya sistem bipolar menuju multipolar menunjukkan arah penguatan karakter-karakter lokal yang ditunjukkan dengan munculnya organisasi-organisasi regional.

Uni Afrika dalam visinya tersebut menyebutkan perlunya menjaga stabilitas keamanan regional (*constitutive Act of African Union, Artikel 3(f)*). Keamanan regional tercipta jika setiap negara dan dimensi manusianya juga merasa aman. Aman dari rasa tertindas, dari kekerasan, kelaparan dan sebagainya. Konflik di Sudan bahkan di negara lainnya sebenarnya merupakan konflik internal negara Sudan namun imbas konflik ini telah menjadi perhatian global. Uni Afrika dituntut untuk memainkan perannya dalam menjaga stabilitas keamanan regional. Pengupayaan perdamaian di Sudan oleh Uni Afrika antara

Pemerintah Sudan dan para pemberontak telah menghasilkan gencatan senjata sejak April 2004 dan UA mengirim tim untuk memantau pelaksanaannya sejak Mei 2004 yakni dengan mengirimkan pasukan perdamaian Afrika bernama *African Union Mission in Sudan (AMIS)*.⁹

Sejauh ini, Uni Afrika sebenarnya baru pertama kali mengirimkan pasukan perdamaian untuk mengatasi konflik di salah satu Negara anggotanya dan telah dirasa cukup berhasil apalagi dengan jumlah personil dan perlengkapan yang terbilang masih minim. Uni Afrika juga merancang *Draft agreement* mencakup “*security, power sharing dan wealth sharing*” yang polanya nampaknya mengacu pada penyelesaian masalah Sudan Selatan.¹⁰ Dikarenakan kekerasan ternyata masih terus terjadi di beberapa wilayah Darfur maka diperlukan strategi kembali mengatasi konflik ini tanpa menimbulkan konflik yang baru serta tidak berimplikasi negatif bagi wilayah lain di Sudan dan negara-negara tetangganya.

Oleh karena itu, penulis tertarik dalam mencari tahu lebih dalam lagi mengenai **”PERANAN UNI AFRIKA (AFRICAN UNION) DALAM MENGUPAYAKAN PERDAMAIAN DI WILAYAH NEGARA SUDAN dengan Studi Analisis Pada Konflik di Darfur dalam Kurun Waktu 2003-2007”**. Pada Akhirnya diharapkan penyelesaian masalah Sudan khususnya di Sudan Barat (Darfur) yang telah diupayakan berdampak positif bagi perdamaian dan pembangunan di Sudan.

⁹ Abdul Hadi Adnan, *Op. Cit*, hlm. 6-8

¹⁰ *ibid*

B. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan konflik di wilayah Sudan khususnya di Darfur?
2. Bagaimana komitmen Uni Afrika dalam meningkatkan keamanan kawasan Afrika?
3. Apa saja upaya perdamaian yang dilakukan oleh Uni Afrika dalam mengatasi konflik di wilayah Sudan Barat/ Darfur?
4. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Uni Afrika dalam penciptaan perdamaian di wilayah Sudan Barat/ Darfur?

1. Pembatasan Masalah

Luasnya permasalahan yang ada dan agar permasalahan ini tidak keluar dari topik yang dibahas, maka penulis mencoba untuk membatasi pokok permasalahan dengan menitikberatkan pada peranan Uni Afrika dalam mengupayakan perdamaian atas konflik internal antara kelompok *Liberation Movement/Army (SLM/A)*, *Justice and Equality Movement (JEM)*, Janjaweed serta pemerintah Sudan GoS (*Government of Sudan*) dalam kurun waktu 2003 sampai dengan 2007 di wilayah Sudan Barat (Darfur).

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk memudahkan dalam menganalisa masalah penelitian ini maka penulis merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut: **“Bagaimana peranan Uni Afrika dalam mengupayakan proses perdamaian di wilayah Sudan Barat (Darfur) dalam kurun waktu 2003-2007?”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang harus dicapai, antara lain :

- a. Untuk mengetahui perkembangan konflik di wilayah negara Sudan, khususnya di Darfur
- b. Untuk mengetahui komitmen Uni Afrika dalam meningkatkan stabilitas keamanan di Afrika.
- c. Untuk mengetahui peranan Uni Afrika dalam mengupayakan perdamaian di wilayah Sudan Barat / Darfur.
- d. Untuk mengetahui kendala-kendala penciptaan perdamaian di wilayah Barat Sudan / Darfur.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sebagai referensi bagi pihak yang berminat mendiskusikan atau menelaah lebih lanjut mengenai Organisasi regional Uni Afrika, dan kaitannya dengan perkembangan perdamaian atas konflik di wilayah Sudan Barat (Darfur)
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan studi Hubungan Internasional dan dijadikan pembandingan bagi studi lainnya yang berkaitan dengan Peranan Uni Afrika dalam mengupayakan perdamaian di wilayah negara Sudan, khususnya di Darfur.
- c. Sebagai salah satu syarat kelulusan Sarjana Strata satu (S1) Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Pasundan.

D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1. Kerangka Teoritis

Sebagai pedoman untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, maka penulis menggunakan suatu kerangka teoritis yang sesuai dengan pembahasan diatas, agar dapat membantu penulis dalam memahami perbedaan yang besar tentang data dan peristiwa dalam Hubungan Internasional. Kerangka berpikir ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisa permasalahan dengan ditopang oleh pendapat para pakar Hubungan Internasional serta para pakar yang kompeten dalam penelitian ini. Diharapkan hasilnya tidak jauh dari sifat yang ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Menurut

Mohtar Mas'oe¹¹ ” ...teori adalah suatu bentuk pernyataan 'mengapa' ; artinya, berteori adalah upaya memberi makna pada fenomena yang terjadi”.

Fenomena yang terjadi dalam perumusan masalah yang dikemukakan penulis tentu sangat berkaitan erat dengan teori dari Hubungan Internasional. Masalah yang dikemukakan terkait dengan berbagai aktor dan isu yang menjadi kajian Ilmu Hubungan Internasional serta mungkin ilmu lainnya yang mendukung. Maka ada baiknya untuk lebih dahulu mengemukakan teori tentang Hubungan Internasional.

Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas negara. Mengutip dari pendapat **Graham Evens dan Jenffney Newham** yang mengartikan **“Hubungan Internasional sebagai suatu istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antara aktor-aktor negara dengan melewati batas-batas negara”**.¹²

Mochtar Mas'oe¹³ menyatakan bahwa:

“Hubungan internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan sub nasional, serta birokrasi pemerintah domestik serta individu-individu. Pada dasarnya studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor, negara maupun non negara, di dalam wujud arena transaksi internasional. Perilaku itu biasa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional, dan sebagainya.”¹³

¹¹ Mochtar Mas'oe¹¹, *Ilmu Hubungan Internasional, disiplin dan Metodologi*. (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1990), hlm. 189.

¹² Graham Evens dan Jenffney Newham dalam Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Rosda, 2005), hlm. 4.

¹³ Mochtar Mas'oe¹³, *Op. Cit.*, hlm. 28.

Menurut **Suwardi Wiriadmadja** Hubungan internasional adalah sesuai untuk mencakup segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia dan kekuatan tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berfikir manusia.¹⁴

Mc. Clelland mendefinisikan “Hubungan Internasional secara jelas sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi”.¹⁵

Hubungan internasional terjadi akibat kebutuhan untuk mendapatkan sesuatu manfaat dari interaksinya dengan negara lain. Negara adalah kesatuan kelompok yang sangat besar dan akan menjadi sangat kecil jika disatukan dalam suatu sistem internasional. Setiap individu berpolitik untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapainya begitu juga negara. Dalam hal ini setiap negara berupaya untuk menyampaikan kepentingan nasional negara masing-masing dalam wujud politik luar negeri. Politik luar negeri ini diartikan oleh **Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani** “merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, serta, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional dalam kancah dunia

¹⁴Suwardi Wiriadmadja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: Pustaka Gramedia, 1970), hlm. 2.

¹⁵Mc. Clelland dalam Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani, *Loc.Cit.*

internasional.¹⁶ Tentu saja kebijakan ini bersumber dari kebutuhan domestik dan berasal dari kebutuhan dunia internasional pada saat kondisi tertentu. Misalnya ketika ada isu mengenai terorisme maka beragam bentuk propaganda negara lain dalam bentuk kebijakan luar negerinya ikut menentang adanya terorisme begitu juga dengan isu-isu lainnya.

Hubungan internasional pada satu dasawarsa terakhir menunjukkan berbagai kecenderungan baru yang secara substansial sangat berbeda dimasa-masa sebelumnya. Ada banyak contoh seperti saat berakhirnya Perang Dingin, mengemukakannya isu-isu baru seperti konflik etnis, munculnya terorisme internasional, globalisasi dan berbagai aspeknya, regionalisme, dan kecenderungan internasionalisasi berbagai isu-isu lokal. Adapun kecenderungan regionalisme terbentuk disebabkan oleh berbagai faktor dimana adanya kedekatan baik yang bersifat geografis, identitas budaya, kesamaan ideologi dan lain-lain.

Cantori dan Spiegel mengakui bahwa dalam menetapkan pembagian suatu kawasan serta sub-kawasan secara tegas (*clearcut identification*) cukup sulit. Namun ada beberapa hal yang biasa kita gunakan dalam mengidentifikasi suatu kawasan atau sub-kawasan yaitu:

- a. Suatu kawasan atau sub-kawasan terdiri dari Negara-negara yang terletak geografisnya berdekatan, baik seluruhnya maupun sebagian dari wilayah Negara tersebut.
- b. Pertimbangan kedekatan geografis perlu ditunjang dengan adanya kesamaan kepentingan atau kedekatan dari segi social, politik, ekonomi dan organisasi.
- c. Terdapat interaksi yang serta dan ciri-ciri spesifik diantara komunitas pada Negara-negara di dalam suatu kawasan serta sub-kawasan, baik dari segi social, budaya, ekonomi, politik maupun dari segi geografi.
- d. Luas sempit wilayah dan banyak sedikitnya jumlah Negara tidak menentukan.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 47.

- e. Keeratan hubungan politik baik yang berlawanan (*antagonistic*) maupun yang selaras (*cooperative*) serta latar belakang historis atau sejarah ikut serta menentukan pengidentifikasian kawasan dan sub-kawasan.
- f. Adakalanya suatu kawasan atau sub-kawasan terbentuk oleh faktor munculnya kesamaan kepentingan atau pengejawantahan identitas baru sehubungan dengan sikap dan tindakan Negara diluar kawasan atau sub-kawasan tertentu itu.¹⁷

Adapun bentuk-bentuk regionalisme menurut pendapat para pakar yang dirangkum oleh **Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani** adalah kerjasama yang sudah mencapai tahap integrasi ekonomi. Bentuk ini terbagi ke dalam dua jenis. *Pertama* 'intergrasi dangkal' (*shallow integration*) yang hanya mengacu pada upaya regional untuk mengurangi atau menghapuskan kendala-kendala perdagangan, dan yang *kedua* adalah 'intergrasi dalam' (*deep integration*) yang bertujuan pada kesatuan ekonomi dan fiskal secara menyeluruh. Bentuk berikutnya adalah *Inter-Regionalism* dan *regional transnationalism*. Bila yang *pertama* mengacu pada kerjasama kawasan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, maka bentuk yang *kedua* mengacu pada proses kerjasama yang melibatkan aktor-aktor ekstra regional (termasuk aktor bukan negara/ MNC) yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi, politik dan kultural contohnya saja ASEAN-UE. Bentuk ketiga dari regionalisme adalah hubungan antara kelompok regional dengan *single power*. Hubungan ini adalah bentuk campuran yang menyerupai hubungan antar kawasan namun biasanya *single power* memainkan

¹⁷ Teuku May Rudy, "*Studi Kawasan : Sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik Di Asia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 1997), hlm. 11.

peranan yang sangat dominan dalam kerjasama tersebut. Hal ini dicontohkan dengan peranan AS dalam kancah dunia dan dominasinya.¹⁸

Dari berbagai aspek geografis, geopolitik, dan geostrategi hubungan antar negara-bangsa yang terjadi berkembang ke wilayah interaksi kepentingan nasional suatu bangsa atau negara dengan yang lainnya yang berwujud pada adanya kerjasama regional maupun internasional dengan dibentuknya rezim-rezim internasional maupun organisasi internasional kawasan yang memiliki visi dan misi yang beragam. Organisasi internasional menjadi bagian yang penting dikarenakan beberapa wilayah diplomasi internasional dalam kancah politik, ekonomi, sosial, budaya dapat dilakukan oleh aktor-aktor tersebut dengan lebih mudah apalagi dengan kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi seperti sekarang ini.

Pengertian Organisasi internasional sendiri menurut **Clive Archer** adalah

Organisasi internasional terdiri dari dua kata organisasi dan internasional. Kata pertama diartikan dalam beberapa makna. Pertama, intergovernmental yang berarti interstate atau hubungan antara wakil resmi dari negara-negara yang berdaulat. Kedua, aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok dinegara lain serta juga termasuk hubungan intergovernmental yang disebut dengan hubungan transnational. Ketiga, hubungan antara suatu cabang pemerintah di suatu negara (seperti Departemen Pertahanan dengan suatu cabang pemerintah di suatu negara lain ... dimana hubungan tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri disebut transgovernmental. Ketiga hubungan ini termasuk dalam hubungan internasional.

.... Dalam hal ini dijelaskan bahwa organization adalah suatu proses sedangkan international organizations adalah aspek-aspek representatif dari suatu fase dalam proses tersebut yang telah dicapai dalam suatu waktu tertentu.¹⁹

¹⁸Cantori dan Spiegel dalam Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Op.Cit.*, hlm. 103-110.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 91-92.

Bentuk-bentuk organisasi internasional beragam ada yang membagi bentuknya berdasarkan sifat keanggotaan yang dimiliki ada yang bersifat regional dan universal.

Organisasi regional menurut **Bennet**

didefinisikan sebagai suatu kerjasama antar negara yang didasarkan atas kedekatan geografis anggota-anggotanya. Menurut penganut paham regionalis, kerjasama regional lebih penting dibandingkan kerjasama universal, hal ini disebabkan oleh: (1) adanya kecenderungan alami menuju proses regionalisme didasarkan atas suatu homogenitas dari kepentingan, tradisi serta nilai-nilai dari kelompok kecil suatu kehidupan bertetangga negara-negara; (2) intergrasi politik, ekonomi serta sosial akan lebih mudah diraih dengan jumlah negara yang lebih sedikit dengan ruang lingkup yang sempit; (3) ancaman internal terhadap perdamaian akan segera diupayakan oleh pemerintah di wilayah tersebut dibandingkan dengan upaya-upaya penyelesaian suatu konflik dengan jangkauan yang lebih luas.²⁰

Sedangkan berdasarkan tujuannya dibedakan dalam dua bentuk yakni yang memiliki tujuan yang umum maupun yang khusus. Terdapat dua kategori utama organisasi internasional, yaitu Organisasi antar pemerintah (*Intergovernmental Organization/ IGO*), beranggotakan delegasi resmi, serta *Non-Governmental Organization (NGO's)*.²¹

Organisasi internasional dibentuk tidak untuk saling memerangi antar anggota tapi sebagai wadah untuk bertemu, mengadakan perjanjian sehingga menghasilkan suatu kerjasama. Kehadiran organisasi internasional sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut. Setiap organisasi Internasional pasti memiliki peranannya

²⁰ Bennet dalam T May Rudi, *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin* (Bandung: PT. Refika Aditama: 2002), hlm.83.

²¹ Clive Archer dalam Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Op.Cit.*, hlm. 93.

sendiri-sendiri sesuai dengan visi dan misi yang dimilikinya. Adapun konsep peranan menurut **Soejono Soekanto** adalah:

Peranan memiliki pengertian sebagai sesuatu yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²²

Adapun peranan Organisasi Internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
- b. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemunya anggota-anggota untuk membicarakan dan membahas masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya maupun negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
- c. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.²³

Jika dilihat dari peranan dari organisasi internasional maupun tujuan dari Hubungan Internasional adalah sebagai wadah berkumpulnya aktor seperti negara, organisasi, kelompok, serta individu untuk bisa berinteraksi satu sama lain demi tercapainya tujuan masing-masing. Sehingga output yang diharapkan adalah terciptanya suatu kerjasama dan meminimalkan terjadinya konflik.

Koesnadi Kartasasmita memberikan definisi kerjasama sebagai berikut:

Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensia dan bertambahnya

²² Soejono soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 1994), hlm.269.

²³ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Op. Cit.*, hlm. 95.

kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena *national understanding* dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama ini didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik.²⁴

Menurut **Teuku May Rudi**, Suatu pola kerjasama bisa terjadi melintasi batas negara, seperti definisi berikut:

Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antar pemerintah dengan pemerintah, maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada negara berbeda.²⁵

Dalam Hubungan Internasional, pola interaksi yang terjadi selain kerjasama adalah konflik dan persaingan.

Hugh Miall mendefinisikan konflik adalah

Conflicts is an intrinsic and inevitable aspect of social change it is an expression of the heterogeneity of interest, values and belief that arise as new formations generated by social change come up against inherited constraints.

(Konflik adalah suatu hakekat dan aspek perubahan sosial yang tidak dapat dihindarkan, hal ini merupakan ekspresi dari keberagaman kepentingan, nilai, kepercayaan yang bangkit sebagai formula baru yang secara luas oleh perubahan sosial berubah menjadi sifat pemaksaan).²⁶

Konflik merupakan suatu “kondisi penjumlahan kosong” (*zero-sum condition*) sebagaimana layaknya dalam teori permainan (*game theory*), dimana perolehan salah satu pihak dalam jumlah sama. Disini objek yang menjadi perebutan para aktor adalah sama Disamping itu, terdapat keberadaan aktual/

²⁴ Koesnadi Kartasasmita, *Organisasi dan Administrasi Internasional*. (Jakarta: 1997) Hlm 20

²⁵ T May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional* (Bandung: Refika, 2005), hlm.3.

²⁶ Hugh Miall dkk. *Contemporary conflict Resolution* (Polity Press, 1999), hlm.5.

ancaman substansial penggunaan instrumen militer. Kerjasama hanya dilakukan untuk membatasi/ mengakhiri konflik.

Dalam kumpulan artikel yang ditulis oleh **Simon Fisher dkk**, konflik dinilai sebagai

...suatu kenyataan hidup dan terjadi ketika sasaran yang ingin dicapai tidak sejalan.... Dan ternyata konflik pun memberi manfaat yakni membuat orang-orang menyadari adanya banyak masalah dan mendorong kearah perubahan yang diperlukan untuk memperbaiki solusi, menumbuhkan semangat, mempercepat perkembangan pribadi, menambah kepedulian diri, mendorong kesenangan....

Pembagian jenis konflik berdasarkan sasaran dan perilaku dibagi menjadi empat tipe,yakni

- a. Tanpa Konflik, jika setiap kelompok ingin berusaha hidup damai
- b. Konflik laten, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan sehingga dapat ditangani secara serius
- c. Konflik terbuka, adalah yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya
- d. Konflik di permukaan, memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran dan dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.²⁷

Adapun yang menjadi sumber konflik dijelaskan oleh **Kumar**

Repasinghe antara lain:

Jelasnya akar penyebab konflik sangatlah kompleks, pengkategorisasian yang mudah tidaklah cukup. Bagaimanapun juga penyusunan bentuk-bentuk konflik secara bebas yang berdasarkan penyebab yang umum dapat membantu menciptakan sebuah kerangka berfikir yang dapat dipergunakan untuk menyesuaikan dengan konflik-konflik kontemporer. Faktor-faktor tersebut antara lain;

- a. Konflik karena faktor sumber daya alam dimana persaingan yang terjadi adalah persaingan kekuatan dan akses ke sumber daya alam tersebut
- b. Konflik antar pemerintah dan kewenangan dimana terjadi persaingan untuk mendapatkan kekuatan politik dan partisipasi dalam proses politik
- c. Konflik berdasar ideologi dimana terjadi persaingan antara pesaing ideologi dan sistem nilai
- d. Konflik berdasarkan identitas dimana terjadi persaingan antara etnik lain, agama, atau kelompok identitas lainnya untuk mendapatkan akses ke kekuatan politik dan ekonomi serta keadilan sosial.²⁸

²⁷ Simon Fisher, dkk. *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Terjemahan oleh SN Kartikasari, dkk. (Jakarta: SMK Grafika Desa Putra, 2004), hlm. 4-6.

Menurut **Azar** dalam analisisnya mengenai pra-kondisi yang mengarah terjadinya konflik.

Pertama, konflik dikaitkan dengan pra-kondisi yang disebutnya *communal content*. Dalam kaitannya dengan pra-kondisi ini terjadinya konflik dipicu oleh hubungan yang tidak harmonis antara kelompok identitas seperti suku, agama, dan budaya tertentu dengan negara *Kedua*, konflik dikaitkan dengan kenyataan bahwa pemerintah telah gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan sehingga terjadi pemiskinan secara sistematis *Ketiga*, sebab yang berkaitan dengan karakteristik pemerintahan yang otoriter dan mengabaikan aspirasi dari akar rumput *Keempat*, pra-kondisi yang berkaitan dengan ‘*international linkage*’ yaitu sistem ketergantungan yang terjadi diantara satu negara dengan sistem ekonomi global di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memihak pada kekuatan modal asing dari pada kepentingan penduduk lokal.²⁹

Lebih jauh dikemukakan oleh **T May Rudy**, Mengutip pendapat **Ted Robert Gurr** dalam tulisannya ‘*Why Men Rebel*’ mengemukakan, bahwa biasanya konflik dengan menggunakan kekerasan terjadi dalam suatu masyarakat karena adanya kekecewaan (frustasi) akibat tidak terakomodasinya harapan-harapan dalam suatu sistem politik (masyarakat atau negara). Frustrasi menyebabkan perasaan tertindas oleh kelompok lainnya atau oleh pemerintah. Lalu muncullah konflik termasuk konflik dengan menggunakan kekerasan. Maka sehubungan dengan manajemen konflik internal yang dilakukan mestinya mengobati rasa frustrasi atau kecewa dan meminimalisir perasaan tertindas. Hal ini berlaku untuk konflik vertikal maupun horizontal.³⁰

²⁸ Kumar Repasinghe. *Civil War, Civil Peace An Introdcion To Conflc Resolution* (London: Pluto Press, 1998), hlm.33.

²⁹ Aleksius Jemadu, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internansional Aktor, Isu dan Metodologi*, Ed. Yulius Hermawan (Yogyakarta: Graha Ilmu: 2007). Hlm. 80.

³⁰ T May Rudi, *Op.Cit.*, hlm. 105-109.

Sedangkan penyebab konflik di Afrika sangat beragam menurut **K**

Mathew yang dikutip oleh **Abdul Hadi Adnan**, antara lain:

- a. gagalnya proses intergarasi dalam pembentukan negara bangsa (contoh: Sudan, Chad, Ethiopia, Rwanda, Somalia dan Uganda);
- b. warisan masa kolonial dan proses dekolonisasi yang menyisakan masala, termasuk penentuan garis perbatasan (Ghana, Kamerun, Nigeria dan Togo);
- c. gerakan kemerdekaan atau revolusi sosial yang dipengaruhi Perang Dingin (Angola dan Mozambique);
- d. Konflik akibat ketegangan antaretnik (Burundi, Rwand, Liberia) dan
- e. Munculnya fundatalisme keagamaan (Afrika Utara).³¹

Dari pertengahan 1965-1969, lebih dari duabelas kudeta telah terjadi di Afrika. Menurut **Claude E. Welch** yang dikutip oleh pengarang yang sama, ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perebutan kekuasaan ini. Delapan diantaranya:

- a. Kemosrotan legitimasi partai politik. Sesudah kemerdekaan, sebagian besar negara Afrika diperintah oleh pemerintahan partai tunggal, yang berasal dari gerakan pejuang kemerdekaan. Dalam kenyataannya ternyata banyak dari mereka yang menggunakan kekerasan dan paksaan dalam meebut legitimasi tersebut.
- b. Perpecahan diantara politisi terkemuka. Partai tunggal biasanya diikuti oleh pemusatan kekuatan di tangan satu orang. Sehingga praktis membuat banyaknya tokoh politik yang menginginkan posisis tersebut.
- c. Terbatasnya campur tangan pihak luar dikarenakan masih baiknya relasi bangsa Eropa dengan negara eks jajahannya.
- d. 'penularan'. Keberhasilan suatu kudeta membangkitkan keinginan yang serupa di tempat lain
- e. Keadaan sosial yang tidak stabil. Perasaan primordial hampir mewarnai semua kudeta militer yang terjadi di Afrika. Jika kaum militer memandang pemerintahan dinegerinya didominasi oleh etnis tertentu yang bermusuhan atau bersebrangan dengan mereka, biasanya timbul balas dendam berdasar kesukuan/ kedaerahan yang dengan cepat menimbulkan suatu kekerasan ataupun kudeta.
- f. Korupsi yang merajalela. Korupsi merupakan tuduhan yang biasanya digunakan kaum militer atau pemberontak pada pemerintahan sipil untuk merasionalisasikan intervensi militer/ kudeta terhadap pemerintah.
- g. Kemacetan ekonomi. Tidak segera membaiknya stabilitas ekonomi yang dijanjikan pada saat meraih kemerdekaan membuat kekecawaan yang bisa saja memicu krisis dalam negeri suatu negara.

³¹ Abdul Hadi Adnan. *Op.Cit.* hlm.3.

- h. Kesadaran militer akan kekuatannya. Sehingga gerakan militer semakin yakin dapat memperoleh posisi yang baik dalam pemerintahan.³²

Munculnya kekecewaan akan menimbulkan pergerakan masyarakat atau kelompok yang tidak puas akan suatu kebijakan tertentu yang di buat pemerintah. dan jika tak segera diatasi memunculkan pemberontakan-pemberontakan kecil yang dapat meluas kearah perang.

Pemberontakan Menurut **I Wayan Parhiana**

Peristiwa pemberontakan yang terjadi di suatu negara merupakan masalah dalam negeri dari negara yang bersangkutan. Akan tetapi terkadang peristiwa ini muncul dan semakin lama semakin kuat sehingga menjadi pemberontakan dalam skala besar dengan pengorganisasian secara teratur. Adapun tujuan dari pemberontakan misalnya mengulingkan pemerintah, memisahkan diri, ataupun untuk bergabung dengan negara lain maupun menuntut otonomi yang lebih luas. Meskipun dalam hukum nasional negara yang bersangkutan pemberontakan termasuk melanggar hukum pidana tetapi di dalam Hukum Internasional sendiri tidak mengatur masalah pemberontakan dalam suatu negara. Namun memang akan dirasakan dampaknya positif maupun negatif oleh negara lain.³³

Dalam buku *Terror inc Tracing The Money Behind Global Terrorism* karangan **Loretta Napoleoni** pemberontak diistilahkan dengan “*State-Shell*”. Dalam bukunya ini dijelaskan berbagai jaringan kelompok pemberontak yang memiliki visi-misi tertentu di berbagai belahan dunia dan memperlihatkan fakta adanya jaringan pemberontak yang terkoordinir dengan baik bahkan mungkin saling mendukung satu sama lain.

They develop structure of their own state. However, with money but no political recognition, they could create only the shell of state. This is different from model of nationalism in which the economy and its

³² *Ibid*, hlm.3-4.

³³ I Wayan Parthiana. *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.

infrastructure are built after the process of self-determination leads to political integration. I have called this the new model the state shell model...

According to Professor Christopher Pierson, professor of politics at the University of Nottingham, a modern states displays nine main characteristic. Of these the state-shell shares four: a monopoly on the means of violence; territoriality; taxation; and public bureaucracy. The remaining five – sovereignty; constitutionality; rule of law; impersonal power; and the legitimacy of authority and citizenship- are absent.³⁴

Adapun pengaruh pemberontakan itu dalam skala internasional disebutkan

oleh **I Wayan Parhiana** antara lain:

- a. Pemberontakan yang terjadi di dalam suatu negara dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di negara-negara lain, seperti di negara tetangganya yang terdekat. Misalnya timbulnya pengungsian ke negara tetangga tersebut...
- b. Pemberontakan yang meluas sampai kelautan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pelayaran internasional bahkan penerbangan internasional dan jika berlangsung lama maka akan mengganggu perekonomian internasional...
- c. Terkaitnya kepentingan negara-negara lain di daerah/ wilayah pemberontakan tersebut...
- d. Pemberontakan di dalam suatu negara seringkali menimbulkan korban, baik itu anggota militer kelompok yang bertikai tetapi juga melibatkan nyawa warga sipil sehingga hal ini menjadi masalah kemanusiaan yang akan menyentuh hati nurani umat manusia di dunia....³⁵

Untuk konflik yang terjadi di Sudan baik di Sudan Selatan maupun di Darfur merupakan konflik yang panjang yang di sebabkan oleh berbagai macam hal dan kepentingan. Misalnya di Darfur, terjadi bentrok antara kelompok pemberontak *Sudan Liberation Movement Army (SLM/A)* dan *Justice and Equality Movement (JEM)* maupun dengan pemerintahannya serta milisi Sudan

³⁴ Loretta Napoleoni, *Terror inc Tracing The Money Behind Global Terrorism* (England: Penguin Books: 2004) hlm.87-88.

³⁵ I Wayan Parthiana. *Loc.Cit*

Arab *Janjeweed*. Mungkin konflik etnis yang awalnya dipicu oleh masalah perebutan sumber daya alam menjadi konflik internal yang berdimensi horizontal maupun vertikal seperti di gambarkan oleh **Andi Purwono**

Konflik pertama terjadi antara pemerintah bersama kelompok milisi melawan pemberontak. *Konflik kedua* terjadi antara milisi pemerintah yang menyerang penduduk dan yang *ketiga* melibatkan perjuangan rakyat Darfur itu sendiri. Dalam kaitan yang berjaln berkelit dan seperti itu maka kemudian implikasi konflik melebar melewati batas wilayah Darfur. Perang secara tidak langsung menyeret keterlibatan rezim baik di Sudan maupun Chad dan berpotensi memiliki dampak kekacauan di bagian lain negara itu.³⁶

Menurut **Abdul Hadi Adnan**, Mantan Duta Besar RI untuk Sudan, pembahasannya mengenai Darfur

konflik di antara sebagian dari 80 suku di Darfur yang hampir seluruhnya beragama Islam, tidak dapat dikategorikan sebagai *ethnic cleansing* karena dalam konflik Darfur ini yang terlibat bertrokan adalah sesama muslim. Bahkan konflik inter-etnik pun terjadi. Menjelang putaran terakhir perundingan di Abuja 2006, kelompok SLM bertrok dengan JEM, agar jika ada penyelesaian politik maka kelompok pemberontak yang lebih menonjol akan beroleh posisi yang lebih baik.³⁷

Kasus Sudan sendiri telah menarik perhatian dunia dengan jumlah korban dan kerusakan yang ditimbulkannya. Maka dibutuhkan suatu resolusi konflik untuk mengupayakan perdamaian. **Wallensteen** mendefinisikan **resolusi konflik sebagai suatu situasi dimana pihak-pihak yang bertikai mencapai kesepakatan untuk mengatasi inti permasalahan yang ada diantara mereka dan menerima kelanjutan eksistensi dari masing-masing pihak serta menghentikan semua aksi kekerasan.**³⁸ Upaya ini bisa dilakukan dengan cara

³⁶ www.suaramerdeka.com, Andi Purwono, Intervensi Asing dalam Krisis Darfur, diakses tanggal 20 April 2008.

³⁷ Abdul hadi Adnan, *Op. Cit*

³⁸ Aleksius Jemadu, *Op. Cit*. Hlm. 80.

mediasi, negosiasi maupun intervensi langsung lewat DK PBB maupun organisasi lainnya. Seperti yang tercantum dalam trilogi perdamaian yakni ada upaya *Peace Making* (menciptakan perdamaian), *Peace Keeping* (menjaga perdamaian), dan *Peace Building* (menggalang perdamaian). **Perdamaian adalah suatu proses....untuk menjalin hubungan antar individu, kelompok dan lembaga yang menghargai keragaman nilai dan mendorong pengembangan potensi manusia secara utuh.**³⁹

Banyak pihak yang menganggap krisis Darfur adalah genosida. Pengertian genosida sendiri

Genocide is ...any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

- a. *Killing members of the group;*
- b. *Causing serious bodily or mental harm to members of the group;*
- c. *Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;*
- d. *Imposing measures intended to prevent births within the group;*
- e. *Forcibly transferring children of the group to another group.*

– *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Article II*⁴⁰

Terjadi genosida sesuai dengan keputusan PBB 1948 dalam *Genocide Convention* maka “ *States that members of United Nations may be called upon to help such actions...as they consider appropriate to prevent and suppress act of*

³⁹ Simon Fisher, dkk, hlm.13-14

⁴⁰ <http://www.bookrags.com/genocide>, diakses tanggal 9 Juli 2008

genocide".⁴¹ Sebagai upaya perdamaian sebenarnya telah dilakukan oleh berbagai pihak, PBB, tekanan Amerika Serikat dan upaya Uni Afrika sendiri untuk memediasi perdamaian.⁴²

Berdasarkan konsep dan teori diatas, sekaligus sebagai kerangka konseptual bagi penelitian ini, peneliti merumuskan serangkaian *asumsi*, yaitu;

1. Konflik di Sudan Barat (Darfur) terjadi baik secara vertikal antara kelompok pemberontak *Sudan Liberation Movement Army (SLM/A)* dan *Justice and Equality Movement (JEM)* dengan pemerintah maupun horizontal antara kelompok masyarakat arab dan non-arab bahkan masyarakat sesama muslim di wilayah Sudan Barat (Darfur).
2. Konflik yang terjadi di suatu negara dapat meluas dan mempengaruhi stabilitas negara di dalam satu kawasan maupun dunia.
3. Uni Afrika sebagai organisasi regional kawasan di Afrika memiliki peran untuk menjaga stabilitas kawasannya sebagai bagian dari peran pentingnya tersebut maka Uni Afrika dituntut untuk memainkan perannya dalam mengupayakan perdamaian di Darfur, Sudan.

⁴¹ <http://www.pbs.org>. Army Castello. Chad/ Sudan: A Question of Genocide, diakses tanggal 20 Mei 2008.

⁴² www.tempointeraktif.com. Problem Darfur dalam Konferensi Uni Afrika, diakses tanggal 22 Februari 2008.

2. Hipotesis

Berdasarkan keseluruhan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik hipotesis atau kesimpulan sementara, yaitu

“Jika Uni Afrika dapat menanggulangi konflik melalui pengiriman pasukan perdamaian, menjadi mediator perdamaian, dan memberikan bantuan kemanusiaan maka perdamaian di Darfur dapat terwujud ”

3. Operasional Variabel dan indikator

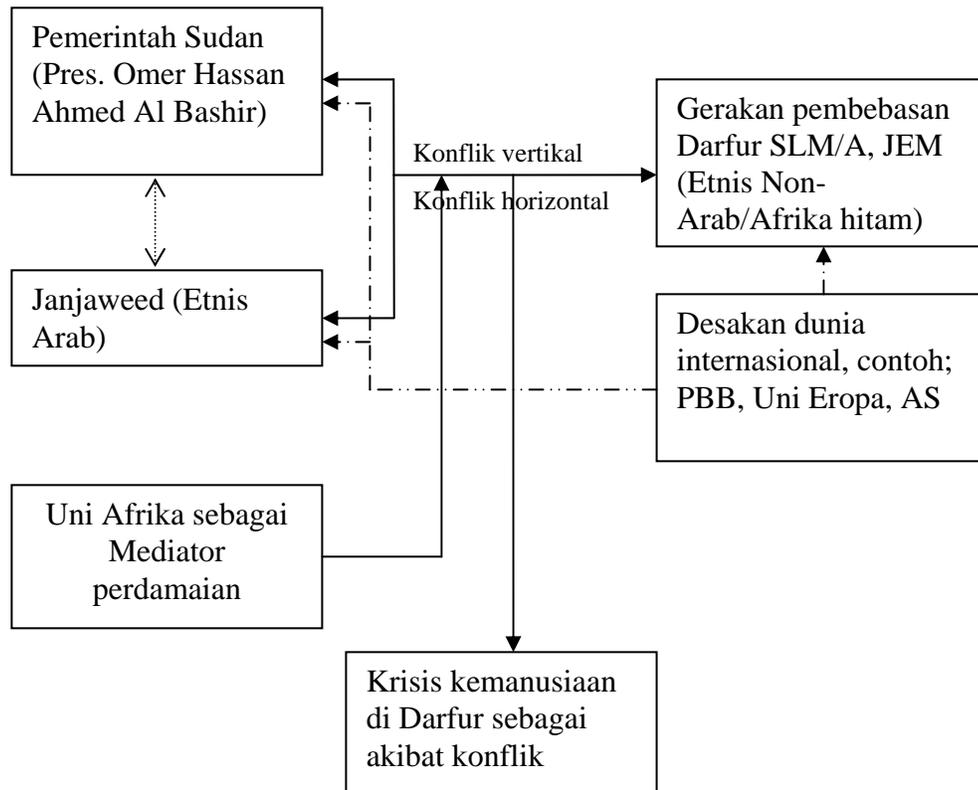
Tabel 1, Operasional Variabel

Variabel (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas: Jika Uni Afrika dapat menanggulangi konflik melalui pengiriman pasukan perdamaian, menjadi mediator perdamaian, dan memberikan bantuan kemanusiaan	1. Penciptaan perdamaian di kawasan Afrika merupakan bagian tujuan dan prinsip dari Uni Afrika (<i>African Union</i>) 2. Adanya pembahasan mengenai upaya penanggulangan konflik di Sudan, khususnya konflik Darfur di forum regional maupun internasional 3. Adanya upaya pengiriman pasukan Uni Afrika perdamaian ke wilayah Darfur	1. Adanya data dan fakta tentang <i>Constitutive Act of African Union</i> yang berisi tujuan dan prinsip Uni Afrika serta adanya dewan yang menaungi masalah <i>Peace and Security</i> di UA 2. Adanya data dan fakta mengenai pertemuan antara para pemimpin Uni Afrika yang membahas masalah di Darfur 3. Adanya data dan fakta mengenai pengiriman pasukan AMIS (<i>African Mission in the Sudan</i>) di Darfur

<p>Variabel Terikat: Perdamaian di Darfur dapat terwujud</p>	<p>4. Adanya upaya Uni Afrika dalam memberikan bantuan kemanusiaan di Darfur</p> <p>1. Menurunnya intensitas konflik kekerasan</p> <p>2. Menurunnya jumlah korban konflik</p> <p>3. Meningkatnya kondisi sosial Kemanusiaan korban konflik</p>	<p>4. Adanya data dan fakta mengenai pencarian dana yang dilakukan oleh UA untuk membantu misi kemanusiaan di Darfur</p> <p>1. Adanya data dan fakta mengenai kondisi keamanan dan konflik kekerasan di Darfur</p> <p>2. Adanya data dan fakta yang menjelaskan kondisi korban konflik di Darfur.</p> <p>3. Adanya data dan fakta mengenai kondisi sosial kemanusiaan korban konflik</p>
---	--	--

4. Skema Kerangka Teoritis

Skema 1, Alur konflik di Darfur



Judul Skripsi:

“ PERANAN UNI AFRIKA (*AFRICAN UNION*) DALAM MENGUPAYAKAN PERDAMAIAN DI WILAYAH SUDAN; Studi Analisis Konflik di Sudan Barat (Darfur) Tahun 2003-2004”

E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. Tingkat Analisis

Dalam menentukan tingkat analisis dalam studi hubungan internasional terlebih dahulu ditetapkan unit analisa yaitu unit yang dianggap sebagai variabel dependen/ variabel terikat. Sedangkan unit eksplanasi yaitu suatu indikator yang berdampak pada unit analisa yang hendak kita amati bisa juga disebut variabel independen.⁴³ Berdasarkan penjelasan di atas unit analisa penelitian ini adalah peranan institusi regional Uni Afrika Sedangkan unit eksplanasi penelitian ini adalah mengenai upaya perdamaian atas konflik di negara Sudan khususnya di wilayah Sudan Barat (Darfur) dalam kurun waktu 2003-2007.. Dari paparan diatas maka analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa reduksionis yaitu: unit explanasinya pada tingkat yang lebih rendah.⁴⁴ Unit analisa berada ditingkatan sistem regional sedangkan unit analisisnya berasal dari negara-Bangsa maupun kelompok.

2. Metode Penelitian

Metode Deskriptif, yaitu penguraian dan penggambaran kondisi yang relevan, kemudian menganalisisnya untuk mendapatkan penjelasan atas kondisi konflik di Darfur, dan juga mengenai peranan suatu organisasi regional Uni Afrika.

⁴³ Mochtar Mas`oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metode*. (Jakarta:LP3ES, 1994), hlm 35.

⁴⁴ *Ibid.* hlm, 39

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau literatur (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan data terhadap buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, maupun data-data yang terdapat dalam website/ internet, yang berkaitan dengan pembahasan yang ada di judul penulis. Selain itu dapat dilakukan juga teknik wawancara untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber yang dapat dipercaya dan memiliki kapabilitas di wilayah ilmu yang berkaitan dengan permasalahan.

F. Lokasi dan Lama Penelitian

1. Lokasi Penelitian

- a. CSIS (Centre for Strategic and Intenational Studies)
Jln. Tanah Abang III no 2, Jakarta
- b. Departemen Luar Negeri RI
Jln. Taman Pejambon No 6, Jakarta Pusat
- c. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Widya Graha lt. XI, Jln. Jendral Gatot Subroto No. 10 Jakarta
- d. United Nation Information Centre (UNIC)
Menara Eksekutif, lt. 14, Jl. M.H. Thamrin, Kav 9, Jakarta
- e. Perpustakaan FISIP UNPAS
Jln. Lengkong Besar No 68 Bandung

f. Perpustakaan UNPAR

Jln. Ciumbuleuit Bandung

2. Lama Penelitian

Penelitian ini dimulai bulan April sampai dengan Oktober 2008.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini membahas:

- A. Latar belakang masalah, yaitu penuturan aspek-aspek dan tema sentral masalah yang diteliti, serta pertimbangan-pertimbangan pemilihan tema, kali ini tema yang akan dibahas adalah “Peranan Uni Afrika (*Africa Union*) dalam mengupayakan perdamaian di wilayah Negara Sudan; studi analisis konflik di Sudan Barat (Darfur) tahun 2003-2007” dan perlunya masalah itu diteliti serta gambaran yang diharapkan dari penulisan.
- B. Identifikasi masalah yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang timbul dari latar belakang masalah yang dijelaskan, dan terdiri atas:
 1. Pembatasan masalah, pembatasan ruang lingkup dari tema, yaitu menetapkan batasan permasalahan dengan jelas serta pembatasan waktu penelitian.
 2. Perumusan masalah, upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin peneliti cari jawabannya, yaitu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang bersumber dari masalah yang telah dipilih dalam pembatasan masalah.
- C. Tujuan dan kegunaan penelitian.

Yaitu upaya mengungkapkan arah dan tujuan umum dari apa yang akan dicapai atau diharapkan dari sebuah penelitian sehingga merupakan lanjutan dari identifikasi masalah.

D. Kerangka pemikiran.

Kerangka pemikiran yang merupakan sumber dan landasan untuk menganalisis masalah yang akan diteliti. Secara umum kerangka teoritis berisi teori-teori yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas. Yang terdiri atas:

1. Hipotesis Penelitian.

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.

2. Operasional Variabel dan Indikator yang dibuat agar dapat melakukan pembuktian terhadap hipotesis.

3. Skema Kerangka Teoritis yang digunakan untuk memudahkan mengenai kerangka teoritis yang dibuat.

E. Metode dan Teknik Pengumpulan data

1. Metode Penelitian yaitu menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian dimana metode yang dipakai adalah metode deskriptif, metode historis analitis.

2. Teknik Pengumpulan data yaitu menerangkan teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian yaitu studi kepustakaan maupun wawancara

F. Lokasi penelitian serta jadwal dan kegiatan penelitian.

Lokasi penelitian adalah membahas tentang lokasi dan berapa lama waktu yang digunakan untuk penelitian.

G. Sistematika Penulisan.

Yaitu memaparkan sistematika yang digunakan dalam melakukan penelitian.

BAB II TINJAUAN TENTANG KONFLIK NEGARA SUDAN

Bab II ini berisi uraian atau informasi umum mengenai Profil Sudan dan mengenai konflik dan perang yang terjadi di Sudan. Serta uraian mengenai kendala-kendala dalam penciptaan perdamaian di negara Sudan antara kaum pemberontak dan pemerintah dan di antara kaum pemberontak itu sendiri khususnya di Sudan Bagian Barat (Darfur). Serta dampak akibat perang yang disebabkan bagi keamanan masyarakat sebagai perwujudan dari konsep *human Security*.

BAB III UNI AFRIKA SEBAGAI PENJAGA STABILITAS KAWASAN AFRIKA

Bab III ini akan membahas uraian atau informasi umum mengenai organisasi Uni Afrika dan perkembangannya. Transformasi Uni Afrika dari OAU (*organization of African Unity*) menjadi (*African Union*). Dalam Bab ini akan dibahas mengenai komitmen Uni Afrika dalam menciptakan stabilitas kawasan sebagai akibat dari konflik di Afrika yang beragam.

BAB IV KONTRIBUSI UNI AFRIKA DALAM MENGATASI KONFLIK DI DARFUR

Bab IV ini berisi uraian atau informasi umum mengenai langkah-langkah yang telah ditempuh Uni Afrika dalam menyelesaikan konflik di wilayah Darfur. Khususnya yang telah dilakukan oleh Uni Afrika sebagai penjaga stabilitas kawasan di Afrika. Serta bagaimana jalannya misi pasukan perdamaian yang

telah dilakukan oleh AMIS (*African Union Mission of the Sudan*). Kendala-kendala yang muncul yang mengakibatkan gagalnya proses-proses perundingan di Darfur. Serta menggambarkan situasi terakhir di Darfur tahun 2007.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini akan memaparkan beberapa kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi mengenai referensi yang di gunakan untuk menunjang penelitian berupa buku-buku, dokumen-dokumen, artikel-artikel dari majalah maupun dari web-site.